

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia, 2004).

_____. *Teori Hierarki Norma Hukum*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinan dan Masa Kini*. (Bogor: Kencana, 2003).

Hadjon, Philipus M. et.al. *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).

Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. (Yogyakarta: Gava Media, 2009).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia*, (Jakarta: Kemenkes, 2020).

Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2018).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2011).

Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. (Los Angeles: SAGE Publications Ltd, 2014).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020),

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. *Panduan Praktik Klinis: Pneumonia 2019-nCoV*. (Jakarta: PDPI, 2020).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1995).

Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1990).

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Syaukani, Imam. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).

Tim Penyusun. *Buku Panduan Penulisan Hukum (Skripsi)*. (Semarang: Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).

Wijayanto, Danang, et.al. *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019).

B. Tesis

Pawi, Andi Anugrah. *Analisis Politik Hukum Kebijakan Vaksinasi Gotong Royong Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Ditinjau Dari Sistem Peraturan Perundang-Undangan*. Tesis. (Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2021).

C. Jurnal

Fitriana, Mia Kusuma. *Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan di Indonesia sebagai Sarana*

- Mewujudkan Tujuan Negara*. Jurnal Kementerian Hukum dan HAM (Volume 20, Nomor 3, 2015), hlm. 8.
- Harahap, Zairin. *Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi dalam Peraturan Daerah*. Jurnal Hukum. (Volume 13, Nomor 1, Januari 2006), hlm. 43.
- Huda, Ni'matul. *Kedudukan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 28 Nomor 3 2021, hlm. 567.
- Kurniawan, Muhamad Beni. *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan*. Jurnal HAM. (Volume 12, Nomor 1, April, 2021), hlm. 37-56.
- Kurniawaty, Yuniar. *Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 13 Nomor 1 2016, hlm. 55.
- Saraswati, Retno. *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa ke depan*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. (Jilid 43, Nomor 3, Juli, 2014), hlm. 2.
- Setiadi, Wicipto. *Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. (Volume 6 Nomor 4, 2009), hlm. 606-607.
- Sri Nur Hari Susanto dalam *Karakteristik Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*. Administrative Law & Governance Journal (Volume 2 Issue 1, 2019), hlm. 131.

D. Internet

- Ajeng Rahma Safitri. *Catat. Seperti ini Mekanisme Pemberian Vaksinasi COVID-19 untuk WNA di Indonesia*, diakses melalui <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/09/02/catat-seperti-ini-mekanisme-pemberian-vaksinasi-covid-19-untuk-wna-di-indonesia/> pada 23 Maret 2022.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/vaksinasi> pada 6 Juni 2021.

_____, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan> pada 31 Maret 2022.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2021. *Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 di Indonesia*, diakses melalui https://covid19.go.id/storage/app/media/Hasil%20Kajian/2021/Februari/Buku%20Studi%20Pembelajaran%20Penanganan%20COVID-19_BAPPENAS.pdf

Biro Komyanmas Kemenkes RI. *Studi Terbaru: Vaksin COOVID-19 Efektif Mencegah Perawatan dan Kematian*, diakses melalui <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210812/4238277/studi-terbaru-vaksin-covid-19-efektif-mencegah-perawatan-dan-kematian/> pada 9 Maret 2022.

CNN Indonesia. 2022. *MA Tolak Uji Materi Perpres Jokowi Soal Sanksi Penolakan Vaksin*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220107194439-12-744028/ma-tolak-uji-materi-perpres-jokowi-soal-sanksi-penolak-vaksin> pada 1 Februari 2022.

Devira Prastiwi. *5 Fakta Soal Anggota DPR Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin COVID-19*, diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/4463720/5-fakta-soal-anggota-dpr-ribka-tjiptaning-tolak-vaksin-covid-19> pada 25 Maret 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat. *Masyarakat yang Tolak Vaksin Harus Jadi Perhatian Pemerintah*, diakses melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31931/t/Masyarakat+Yang+Tolak+Vaksin+Harus+Jadi+Perhatian+Pemerintah> pada 23 Maret 2022.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021, *Tanya Jawab Seputar Vaksinasi COVID-19*, diakses melalui https://dinkesjatengprov.go.id/v2018/storage/2021/07/BUKU-SAKU-VAKSINASI-COVID-19_28MEI2021-.pdf pada 14 Oktober 2021.

Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. diakses melalui <https://thelawdictionary.org/?s=policy> pada 31 Maret 2022.

Heru Dahnur. *PT Timah Gelar Vaksinasi Gotong Royong untuk Masyarakat*. diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2021/10/03/134726226/pt-timah-gelar-vaksinasi-gotong-royong-untuk-masyarakat?page=all> pada 27 Maret 2022.

Humas Lapor COVID-19. *Somasi Atas Permenkes No. 19 2021*. diakses melalui <https://laporcovid19.org/post/somasi-atas-permenkes-no-19-tahun-2021> pada 23 Maret 2022.

Humas Presiden RI. *Tinjauan Vaksinasi Gotong Royong untuk Pekerja, Presiden: Semoga Produksi Kembali Normal*. diakses melalui https://setkab.go.id/tinjau-vaksinasi-gotong-royong-untuk-pekerja-presiden-semoga-produksi-kembali-normal/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tinjau-vaksinasi-gotong-royong-untuk-pekerja-presiden-semoga-produksi-kembali-normal pada 22 Maret 2022.

Humas Sekretariat Kabin Republik Indonesia. *Ini Tugas Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Perpres 82/2020*. diakses melalui <https://setkab.go.id/ini-tugas-komite-penanganan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional-sesuai-perpres-82-2020/> pada 22 Maret 2022.

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 2021.

Data Sebaran COVID-19. diakses melalui <https://www.covid19.go.id> pada 1 Februari 2022.

Latif, Yudi. *Pancasila Sebagai Norma Dasar Negara: Implikasi terhadap Perumusan Konstitusi*. diakses melalui https://www.bphn.go.id/data/documents/yudi_latif_pancasila_sebagai_norma_dasar_negara.pdf pada 3 Maret 2022.

Ogurlu, Yucel. *Administrative Sanctioning System*, pg.2. diakses melalui <https://www.idare.gen.tr/ogurlu-administrative.htm> pada 15 Maret 2022.

Portal Informasi Indonesia. *Sembilan Syarat Penerima Vaksin COVID-19*. diakses melalui <https://indonesia.go.id/kategori/kesehatan/2318/sembilan-syarat-penerima-vaksin-covid-19> pada 15 Maret 2022.

Hidayat, Rofiq. 2021. *3 Ancaman Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi COVID-19*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-ancaman-sanksi-bagi-penolak-vaksinasi-covid-19-lt60e55cc55c91c/?page=2> pada 12 Maret 2022.

Sumarwoto. *Pakar: Perpres 14/2021 tingkatkan ketaatan warga ikuti vaksin COVID-19*. diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/2000245/pakar-perpres-14-2021-tingkatkan-ketaatan-warga-ikuti-vaksin-covid-19> 25 Maret 2022.

Surat Edaran Nomor: HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*). hlm. 1. diakses melalui <https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/2022/Januari/surat-edaran-vaksinasi-covid-19-dosis-lanjutan-booster.pdf>

Supriyanto, Taufik. 2021. *Sanksi Menolak Vaksin: Bagaimana Sanksi Hukum Menolak Vaksin COVID-19 di Indonesia?*, diakses melalui <https://heylawedu.id/blog/sanksi-menolak-vaksin-bagaimana-sanksi-hukum-menolak-vaksin-covid-19-di-indonesia> pada 12 Maret 2022.

Tim Redaktur Media Indonesia. *Bantu Pemerintah, Antam Gelar Vaksinasi Gotong Royong bagi Keluarga Pegawai*. diakses melalui <https://mediaindonesia.com/humaniora/416762/bantu-pemerintah-antam-gelar-vaksinasi-gotong-royong-bagi-keluarga-pegawai> pada 23 Maret 2022.

Tim Redaktur CNN Indonesia. *MA Tolak Uji Materi Perpres Jokowi soal Sanksi Penolak Vaksin.* diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220107194439-12-744028/ma-tolak-uji-materi-perpres-jokowi-soal-sanksi-penolak-vaksin> pada 15 Maret 2022

Kemenkes Jadi Ujung Tombak Vaksinasi COVID-19. diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201007153619-20-555546/kemenkes-jadi-ujung-tombak-vaksinasi-covid-19> pada 22 Maret 2022.

WHO. 2020. *Pernyataan Keilmuan – Transmisi SARS-CoV-2: Implikasi terhadap kewaspadaan pencegahan infeksi*, diakses melalui [transmisi-sars-cov-2---implikasi-untuk-terhadap-kewaspadaan-pencegahan-infeksi---pernyataan-keilmuan.pdf](https://www.who.int/publications-detail/11-implikasi-untuk-terhadap-kewaspadaan-pencegahan-infeksi---pernyataan-keilmuan) (who.int) pada 5 Juni 2021.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan (Pertama) atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI No. HK.02.02/4/1/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terkait syarat penerima vaksin COVID-19